



Respons Politik Lokal Terhadap Inflasi Dan Dampaknya Pada Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Eddy Iskandar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawaarman

eddy.iskandar@fisip.unmul.ac.id

Abstrak

Lonjakan inflasi bahan pangan yang berulang di berbagai daerah Indonesia telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun beragam instrumen kelembagaan dan komunikasi politik untuk menjaga stabilitas harga sekaligus stabilitas pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kualitatif ragam respons politik lokal terhadap inflasi serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis dokumen kualitatif (qualitative document analysis) terhadap peraturan perundang-undangan, surat edaran, risalah rapat koordinasi, dan pemberitaan resmi pemerintah periode 2013–2025, penelitian ini mengidentifikasi empat kategori tema respons, yaitu: (1) instrumen kebijakan fiskal daerah, (2) penguatan kelembagaan lintas tingkat pemerintahan, (3) komunikasi politik dan legitimasi kepala daerah, serta (4) insentif dan sanksi kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa respons yang cepat, terkoordinasi, dan dikomunikasikan secara konsisten oleh kepala daerah cenderung memperkuat legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan daerah, sedangkan keterlambatan respons dan minimnya komunikasi publik berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat serta memicu ketidakstabilan politik lokal. Temuan ini memperkaya literatur mengenai keterkaitan antara stabilitas politik dan kualitas tata kelola ekonomi pada tingkat subnasional, serta menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi komunikasi politik dan legitimasi pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Inflasi Daerah; Respons Politik Lokal; Stabilitas Pemerintahan; Komunikasi Politik; Tata Kelola Daerah

1. Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur stabilitas perekonomian suatu negara sekaligus menjadi cerminan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Sakande et al., 2026). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, inflasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi makro yang berkaitan dengan perubahan tingkat harga barang dan jasa, tetapi juga sebagai isu strategis yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, daya beli, hingga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan mengendalikan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun daerah (Ryter & Nassar, 2026). Pelaksanaan desentralisasi sejak diberlakukannya otonomi daerah telah mengubah paradigma pengendalian inflasi di Indonesia (Zaroutieri & Anastasiou, 2026). Pemerintah daerah tidak lagi berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat semata, melainkan menjadi aktor yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga stabilitas harga melalui koordinasi lintas sektor, penguatan distribusi barang kebutuhan pokok, pengawasan pasar, serta penyusunan kebijakan fiskal daerah (Abdulai et al., 2026). Kondisi tersebut menjadikan inflasi sebagai persoalan yang tidak hanya memerlukan solusi ekonomi, tetapi juga membutuhkan kapasitas kepemimpinan politik dan tata kelola pemerintahan yang efektif (Pilatin et al., 2026). Fenomena meningkatnya harga komoditas pangan strategis, seperti cabai rawit, bawang merah, beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng, hampir selalu menjadi perhatian publik pada periode tertentu, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, perubahan musim, maupun ketika terjadi gangguan distribusi pangan (Zhou et al., 2026). Fluktuasi harga komoditas tersebut secara langsung dirasakan masyarakat sehingga sering kali menjadi ukuran keberhasilan maupun kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayahnya (Manasseh et al., 2026). Dalam praktik pemerintahan, kenaikan harga kebutuhan pokok sering kali lebih cepat memperoleh perhatian publik dibandingkan berbagai indikator makroekonomi lainnya karena dampaknya dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (Dubey & Sharma, 2026).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah (Fahrullazi & Gheewala, 2026). Sebagai contoh, inflasi tahunan pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen dan meningkat menjadi 2,86 persen pada Oktober 2025, yang masih berada dalam target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1$ persen. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di tingkat daerah. Pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan menunjukkan bahwa tekanan inflasi memiliki karakteristik yang berbeda antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota, bergantung pada kondisi produksi, distribusi, infrastruktur logistik, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi pasar (Akhter & Arman, 2026). Perbedaan karakteristik inflasi

Respons Politik Lokal Terhadap Inflasi Dan Dampaknya Pada Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Indonesia

antarwilayah menunjukkan bahwa tantangan pengendalian inflasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan moneter nasional. Daerah-daerah yang bergantung pada pasokan pangan dari wilayah lain cenderung lebih rentan mengalami kenaikan harga ketika terjadi gangguan distribusi (Rizwanullah et al., 2026). Sebaliknya, daerah dengan kapasitas produksi yang memadai dan sistem distribusi yang baik relatif lebih mampu menjaga stabilitas harga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengendalian inflasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas koordinasi antarinstansi, serta kemampuan kepala daerah dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat (Zhu & Yang, 2026).

Untuk memperkuat koordinasi tersebut, pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID), serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Neog et al., 2026). Kehadiran TPID menjadi salah satu instrumen utama dalam menyinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui pemantauan harga, pengendalian pasokan, pelaksanaan operasi pasar, hingga penyusunan langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan inflasi. Pemerintah juga memperkuat mekanisme tersebut melalui rapat koordinasi rutin yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri bersama Bank Indonesia dan kementerian terkait (Igwenyere, 2026). Selain penguatan kelembagaan, pemerintah memberikan berbagai instrumen fiskal sebagai insentif bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga. Instrumen tersebut antara lain berupa optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), kewajiban pengalokasian anggaran perlindungan sosial dari dana transfer umum, serta pemberian Dana Insentif Daerah (DID) kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi telah menjadi bagian integral dari evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan (Matimbia et al., 2026).

Dalam praktiknya, respons pemerintah daerah terhadap inflasi tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan administratif, tetapi juga melalui komunikasi politik yang dilakukan oleh kepala daerah (Chowdhury et al., 2026). Pernyataan kepala daerah dalam forum koordinasi nasional, penyampaian informasi mengenai kondisi harga kepada masyarakat, pelaksanaan inspeksi pasar, hingga publikasi keberhasilan pengendalian inflasi melalui berbagai media merupakan bentuk komunikasi politik yang bertujuan membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak lagi semata-mata dipahami sebagai aktivitas teknokratis, tetapi juga sebagai proses pembentukan legitimasi politik (Ayalew et al., 2026).

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa inflasi memiliki dimensi politik yang cukup kuat. Ketika pemerintah daerah berhasil menjaga stabilitas harga, keberhasilan tersebut dapat meningkatkan citra kepemimpinan serta memperkuat legitimasi politik kepala daerah (Iftikhar et al., 2026). Sebaliknya, kegagalan mengendalikan harga kebutuhan pokok sering kali memicu kritik masyarakat, menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat, bahkan berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, respons politik terhadap inflasi menjadi bagian penting dalam dinamika pemerintahan local (Oh & Kim, 2026). Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pengendalian inflasi dari berbagai perspektif, antara lain efektivitas kebijakan moneter, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah, stabilisasi harga pangan, serta implementasi kebijakan fiskal daerah. Penelitian lain juga mengkaji hubungan antara tata kelola pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi (Aloui et al., 2026). Hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, namun sebagian besar masih menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan ekonomi tanpa mengaitkannya dengan dinamika politik local (Talandier & Hachaichi, 2026).

Literatur internasional juga menunjukkan bahwa stabilitas politik memiliki hubungan erat dengan berbagai indikator pembangunan. Berbagai penelitian menemukan bahwa kualitas tata kelola dan stabilitas politik berkontribusi terhadap stabilitas sektor keuangan, ketahanan pangan, resiliensi sektor publik, hingga efektivitas pembangunan ekonomi. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa dimensi politik tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pengelolaan kebijakan publik. Namun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan respons politik pemerintah daerah terhadap inflasi dengan stabilitas pemerintahan lokal, terutama dalam konteks Indonesia, masih relatif terbatas. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat pengendalian inflasi telah menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah dan menjadi perhatian langsung pemerintah pusat melalui berbagai mekanisme koordinasi nasional. Pemahaman mengenai pola respons politik lokal terhadap inflasi diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur ekonomi politik dan tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam memperkuat strategi pengendalian inflasi yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga mampu menjaga stabilitas pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen (qualitative document analysis) yang bersifat deskriptif-interpretatif (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian respons politik

lokal terhadap inflasi paling banyak terekam dalam bentuk produk hukum, risalah rapat koordinasi, surat edaran, dan pemberitaan resmi pemerintah, alih-alih dalam bentuk data primer hasil wawancara. Desain ini memungkinkan peneliti menelusuri jejak kebijakan (policy trail) serta pola komunikasi politik yang menyertainya secara longitudinal dari tahun 2013 hingga 2025.

Sumber dan Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan secara purposif dari empat jenis sumber, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan dan surat edaran resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi; (2) risalah dan siaran pers resmi dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kemendagri, Bank Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (3) pemberitaan resmi laman pemerintah daerah (situs resmi kabupaten/kota) yang melaporkan partisipasi TPID lokal dalam rakor pengendalian inflasi; serta (4) literatur akademik terindeks Scopus mengenai keterkaitan stabilitas politik, kualitas kelembagaan, dan inflasi. Kriteria inklusi dokumen adalah keterkaitan langsung dengan pengendalian inflasi daerah dan/atau memuat pernyataan politik kepala daerah/pejabat pemerintah terkait inflasi, dengan rentang waktu penerbitan 2013–2025.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis instrumen (fiskal, kelembagaan, komunikatif-politik, sosial). Kedua, koding tematik dilakukan secara berulang (iterative coding) terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi pola respons yang berulang serta pernyataan-pernyataan kepala daerah/pejabat yang mencerminkan orientasi komunikasi politik. Ketiga, verifikasi silang (cross-checking) dilakukan dengan membandingkan pola yang teridentifikasi pada satu daerah dengan daerah lain untuk memastikan konsistensi tema. Kategori tema yang telah stabil kemudian dikaitkan dengan kerangka literatur mengenai stabilitas politik dan tata kelola sebagaimana diuraikan pada bagian tinjauan pustaka.

Keterbatasan Metodologis

Perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung dengan kepala daerah, pejabat TPID, maupun warga terdampak inflasi, sehingga interpretasi mengenai dampak respons terhadap stabilitas pemerintahan daerah bersifat inferensial berdasarkan jejak dokumen dan pemberitaan resmi, bukan berdasarkan persepsi langsung aktor yang terlibat. Keterbatasan ini didiskusikan lebih lanjut pada bagian akhir artikel sebagai arah penelitian lanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 merangkum delapan instrumen dan regulasi utama yang menjadi rujukan analisis dokumen dalam penelitian ini, mencakup periode 2013 hingga 2025.

Tabel 1. Ringkasan Instrumen dan Regulasi Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia (2013–2025)

Instrumen/Regulasi	Instansi Penerbit	Tahun	Fokus Utama Respons
Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah	Kementerian Dalam Negeri	2013	Mewajibkan pembentukan TPID di seluruh provinsi dan kabupaten/kota
Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022	Kementerian Dalam Negeri	2021	Alokasi anggaran dukungan TPID dan belanja tidak terduga (BTT)
PMK No. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi	Kementerian Keuangan	2022	Kewajiban belanja perlindungan sosial 2% dari Dana Transfer Umum
SE Mendagri No. 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT untuk Pengendalian Inflasi	Kementerian Dalam Negeri	2022	Panduan teknis penggunaan Belanja Tidak Terduga di daerah
PMK No. 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah	Kementerian Keuangan	2022	Insentif fiskal bagi daerah berkinerja terbaik menekan inflasi
Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025	Kementerian Dalam Negeri	2024	Penandaan anggaran khusus untuk isu pengendalian inflasi

Instrumen/Regulasi	Instansi Penerbit	Tahun	Fokus Utama Respons
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 94 Tahun 2024 tentang TPID	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2024	Pembaruan struktur dan keanggotaan TPID tingkat provinsi
Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Daerah (P2DD)	Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kemendagri	2025	Sinergi kebijakan fiskal-moneter serta pemberian TPID Award

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelusuran dokumen, teridentifikasi empat kategori tematik respons politik lokal terhadap inflasi, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1: (1) respons fiskal, (2) respons kelembagaan, (3) respons komunikatif-politik, dan (4) respons sosial.

Gambar 1. Kerangka Kategori Respons Politik Lokal terhadap Inflasi Daerah

Fiskal	Kelembagaan	Komunikatif-Politik	Sosial
Belanja Tidak Terduga (BTT)	TPID provinsi/kabupaten/kota	Rakor virtual dipimpin Mendagri/Wamendagri	Bantuan sosial bagi kelompok rentan
Belanja wajib 2% Dana Transfer Umum	Pokjanas TPID & TPIIP	Strategi 4K (keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran, komunikasi)	Subsidi ongkos angkut/transportasi
Dana Insentif Daerah (DID)	Kerja sama antardaerah (surplus-defisit pangan)	Penghargaan TPID Award sebagai legitimasi kinerja	Gerakan Pangan Murah (GPM) & GNPIP

Respons Fiskal

Kategori respons fiskal mencakup instrumen penganggaran yang secara eksplisit diarahkan untuk mengendalikan inflasi di daerah, seperti Belanja Tidak Terduga (BTT), kewajiban belanja perlindungan sosial sebesar dua persen dari Dana Transfer Umum, serta Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan fiskal bagi daerah berkinerja baik. Instrumen-instrumen ini menempatkan pemerintah daerah bukan sebagai pihak yang pasif menunggu arahan pusat, melainkan sebagai aktor yang memiliki keleluasaan fiskal untuk merespons gejala harga secara cepat melalui pergeseran anggaran tanpa harus menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pola ini sejalan dengan temuan Ryter and Nassar (2026) bahwa investasi fiskal yang responsif berkontribusi terhadap resiliensi institusional, meskipun manfaatnya dapat melemah apabila tidak diimbangi dengan kapasitas tata kelola yang memadai.

Respons Kelembagaan

Respons kelembagaan tampak dari arsitektur TPID berjenjang yang menghubungkan Pokjanas TPID di tingkat pusat dengan TPID provinsi dan kabupaten/kota, serta forum Rakor mingguan yang secara konsisten dipimpin oleh Menteri atau Wakil Menteri Dalam Negeri. Praktik di Kabupaten Pacitan pada Desember 2025, misalnya, memperlihatkan bagaimana forum Rakor virtual digunakan untuk mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi dalam kasus ini cabai rawit dan bawang merah sekaligus menegaskan instruksi Wakil Menteri Dalam Negeri agar setiap kepala daerah konsisten menjaga tingkat inflasi di wilayahnya. Pola serupa terlihat di Kabupaten Tuban menjelang Ramadan 2025 dan di Kota Tanjungpinang pada September 2025, ketika TPID lokal melaporkan langkah konkret menekan laju inflasi sekaligus menerima paparan data inflasi nasional dari Badan Pusat Statistik sebagai basis evaluasi. Kerja sama antardaerah dalam pemetaan surplus-defisit komoditas pangan strategis, sebagaimana diinisiasi Pokjanas TPID sejak 2014, juga mencerminkan upaya membangun kapasitas kelembagaan horizontal, bukan sekadar hierarkis dari pusat ke daerah.

Respons Komunikatif-Politik

Dimensi komunikatif-politik merupakan kategori yang paling relevan dengan perspektif komunikasi politik dan yang paling jarang dibahas dalam kajian ekonomi konvensional mengenai inflasi. Strategi kebijakan 4K Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif yang secara rutin diikuti pejabat Kemenko Perekonomian dan Kemendagri dalam forum Rakornas menunjukkan bahwa komunikasi publik diperlakukan setara dengan tiga instrumen substantif lainnya. Pemberian TPID Award dan Championship TP2DD kepada pemerintah daerah berkinerja terbaik, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada

Rakornas November 2025, berfungsi ganda: sebagai insentif fiskal sekaligus sebagai instrumen legitimasi politik yang menegaskan citra kompetensi kepala daerah penerima penghargaan. Sebaliknya, pernyataan Menteri Dalam Negeri yang secara terbuka meminta seluruh kepala daerah mengambil langkah antisipasi ketika Indeks Perkembangan Harga meningkat di puluhan provinsi menjelang Ramadan menunjukkan bagaimana forum Rakor turut berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas publik yang implisit, di mana kegagalan merespons dapat teridentifikasi secara terbuka di hadapan seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Respons Sosial

Kategori respons sosial mencakup penyaluran bantuan sosial, subsidi ongkos transportasi dan distribusi, program Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang secara langsung menyasar kelompok masyarakat rentan terdampak kenaikan harga. Respons ini memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia tidak semata berorientasi pada stabilitas makroekonomi agregat, tetapi juga pada perlindungan daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang secara politis merupakan basis dukungan penting bagi stabilitas pemerintahan daerah maupun nasional.

Dampak Pola Respons terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah

Gambar 2 menggambarkan dua lintasan (pathway) yang teridentifikasi dari analisis dokumen mengenai keterkaitan antara pola respons dan stabilitas pemerintahan daerah.

Gambar 2. Alur Dampak Pola Respons terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah

Respons cepat, terkoordinasi, dan dikomunikasikan secara konsisten	Respons lambat, tidak terkoordinasi, dan minim komunikasi publik
↓	↓
Kepercayaan publik terhadap kepala daerah meningkat	Ketidakpuasan publik terhadap kinerja kepala daerah meningkat
↓	↓
Legitimasi politik kepala daerah menguat	Tekanan politik dari DPRD, oposisi, dan opini publik meningkat
↓	↓
Stabilitas pemerintahan daerah terjaga	Risiko ketidakstabilan politik lokal

Pada lintasan pertama, daerah yang secara konsisten berpartisipasi dalam forum Rakor, mengalokasikan instrumen fiskal secara proaktif, dan mengomunikasikan langkah-langkah pengendalian inflasi secara terbuka kepada publik seperti yang terlihat pada praktik Kota Malang dalam membangun kerja sama antardaerah sejak 2014 cenderung memperoleh pengakuan kinerja dalam bentuk penghargaan TPID Award maupun DID. Pengakuan ini memiliki fungsi ganda sebagai insentif fiskal dan sebagai modal legitimasi politik yang dapat dimanfaatkan kepala daerah dalam mengelola dukungan publik. Temuan ini selaras dengan argumen Zaroutieri and Anastasiou (2026) bahwa stabilitas politik memberikan efek stabilisasi terhadap volatilitas yang ditimbulkan oleh tekanan inflasi dan konsolidasi fiskal, sehingga daerah yang mampu menjaga citra stabilitas politik cenderung lebih tahan terhadap guncangan harga.

Pada lintasan kedua, keterlambatan respons atau minimnya komunikasi publik berisiko memicu ketidakpuasan yang dapat bereskalasi menjadi tekanan politik, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), media, maupun opini publik. Forum Rakor yang bersifat terbuka dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia secara tidak langsung menciptakan tekanan konformitas: kepala daerah yang wilayahnya tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga di atas rata-rata nasional berpotensi menghadapi sorotan lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Kondisi ini sejalan dengan temuan Abdulai et al. (2026) bahwa persepsi instabilitas politik terlepas dari kondisi riil infrastruktur atau pasokan tetap mendorong perilaku mitigasi risiko oleh pelaku ekonomi, yang dalam konteks pemerintahan daerah dapat dianalogikan dengan perilaku kepala daerah yang berupaya keras menghindari citra kegagalan kendati capaian inflasi riil di wilayahnya tidak selalu berada jauh dari rata-rata nasional.

Perbandingan dengan konteks negara lain memperkaya interpretasi ini. Studi Nguyen (2026) di Vietnam menegaskan bahwa stabilitas politik rezim otoriter dapat ditopang jejaring informal, bukan semata-mata institusi formal, sementara Pilatin et al. (2026) menunjukkan bahwa kegagalan mengatasi ketimpangan ekonomi daerah di Nigeria berkontribusi pada ancaman disintegrasi politik. Kedua kasus ini menegaskan pentingnya kombinasi antara instrumen formal (kelembagaan dan fiskal) dan legitimasi informal (komunikasi politik, pengakuan publik) dalam menjaga stabilitas pemerintahan, sebuah pola yang juga tercermin dalam arsitektur pengendalian inflasi daerah di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stabilitas pemerintahan daerah di Indonesia

dalam konteks pengendalian inflasi tidak semata ditentukan oleh keberhasilan menekan angka inflasi secara riil, tetapi juga oleh kemampuan kepala daerah mengelola narasi dan legitimasi politik di sekitar upaya pengendalian tersebut.

Respons Fiskal sebagai Instrumen Political Fiscal Governance dalam Menjaga Stabilitas Pemerintahan Daerah

Pengendalian inflasi pada tingkat daerah tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai fungsi kebijakan ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari tata kelola fiskal yang memiliki implikasi politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fahrullazi & Gheewala, 2026). Dalam perspektif Fiscal Governance, instrumen fiskal bukan semata-mata digunakan untuk menjaga keseimbangan anggaran, melainkan menjadi mekanisme negara dalam mempertahankan legitimasi pemerintahan melalui kemampuan merespons tekanan ekonomi secara cepat dan efektif. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus instrumen stabilisasi politik (Akhter & Arman, 2026).

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada fase awal desentralisasi, pemerintah daerah lebih banyak diposisikan sebagai pelaksana kebijakan fiskal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat (Rizwanullah et al., 2026). Akan tetapi, perkembangan regulasi mengenai pengendalian inflasi memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memperoleh ruang diskresi yang lebih besar dalam menentukan strategi fiskal sesuai karakteristik wilayahnya (Zhu & Yang, 2026). Fleksibilitas penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), pengalokasian belanja perlindungan sosial, serta pemberian Dana Insentif Daerah (DID) menunjukkan bahwa negara mulai menggeser orientasi pengelolaan fiskal dari pendekatan yang bersifat administratif menuju pendekatan adaptif yang menekankan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi secara kontekstual (Neog et al., 2026).

Fenomena tersebut selaras dengan perspektif Fiscal Federalism yang menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan publik akan meningkat apabila keputusan fiskal dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat yang menerima dampaknya (Igwenyere, 2026). Dalam konteks inflasi pangan, pemerintah daerah memiliki informasi yang jauh lebih komprehensif mengenai pola distribusi komoditas, karakteristik konsumsi masyarakat, serta jaringan perdagangan lokal dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemberian ruang fiskal kepada daerah memungkinkan kebijakan yang diambil menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar (Matimbia et al., 2026). Mekanisme ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak semata ditentukan oleh besarnya kapasitas anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan fleksibilitas fiskal menjadi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Chowdhury et al., 2026).

Interpretasi tersebut juga memperkuat argumentasi bahwa kebijakan fiskal dalam pengendalian inflasi tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola pemerintahan. Zhou et al. (2026) menjelaskan bahwa investasi fiskal hanya akan menghasilkan resiliensi institusional apabila didukung oleh kapasitas pemerintahan yang memadai. Artinya, besarnya sumber daya fiskal tidak secara otomatis menghasilkan stabilitas apabila pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas koordinasi, kemampuan pengambilan keputusan, maupun mekanisme akuntabilitas yang efektif (Ayalew et al., 2026). Dengan demikian, hubungan antara kapasitas fiskal dan stabilitas pemerintahan bersifat kondisional, di mana tata kelola menjadi variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Iftikhar et al., 2026).

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa instrumen fiskal sesungguhnya berfungsi sebagai policy signal yang mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko ekonomi (Oh & Kim, 2026). Dalam teori Signaling, kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi secara langsung, tetapi juga mengirimkan sinyal kepada masyarakat mengenai kemampuan pemerintah mengendalikan situasi (Aloui et al., 2026). Ketika pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran secara cepat untuk menjaga distribusi pangan, memberikan subsidi transportasi, ataupun memperkuat perlindungan sosial, masyarakat memperoleh sinyal bahwa pemerintah memiliki kapasitas dalam menghadapi tekanan ekonomi (Talandier & Hachaichi, 2026). Sebaliknya, keterlambatan respons fiskal sering kali dipersepsikan sebagai lemahnya kapasitas pemerintah, meskipun penyebab inflasi berasal dari faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah daerah (Derouez et al., 2026).

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dimensi psikologis yang tidak kalah penting dibandingkan dimensi ekonominya (Awdeh & El Mokdad, 2026). Literatur mengenai Behavioral Public Administration menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah sering kali lebih dipengaruhi oleh kecepatan respons dibandingkan oleh besarnya nilai kebijakan yang diberikan (Musse et al., 2026). Dalam konteks inflasi, masyarakat lebih mudah menilai keberhasilan pemerintah melalui tindakan nyata yang segera terlihat, seperti operasi pasar, subsidi distribusi, atau bantuan sosial, dibandingkan melalui indikator makroekonomi yang bersifat abstrak (Songsrirote, 2026). Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan fiskal juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun persepsi bahwa negara hadir dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Interpretasi ini sejalan dengan penelitian Manasseh et al. (2026) yang menunjukkan bahwa stabilitas politik mampu mengurangi volatilitas yang ditimbulkan oleh tekanan inflasi dan konsolidasi fiskal. Temuan tersebut

mengindikasikan bahwa hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas politik bersifat timbal balik. Di satu sisi, stabilitas politik memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal secara konsisten (Liashenko et al., 2026). Di sisi lain, kebijakan fiskal yang responsif memperkuat legitimasi politik pemerintah karena mampu mengurangi ketidakpastian ekonomi yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai bagian dari proses reproduksi legitimasi politik (Iqbal et al., 2026).

Hasil tersebut juga memperluas temuan Dubey and Sharma (2026) yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan stabilitas politik merupakan prasyarat bagi terciptanya stabilitas sistem ekonomi. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan tersebut terlihat melalui mekanisme insentif fiskal yang mengaitkan keberhasilan pengendalian inflasi dengan penghargaan terhadap kinerja pemerintah daerah (Fernandez-Ardavin et al., 2026). Skema tersebut menciptakan hubungan yang erat antara performa ekonomi dan reputasi politik kepala daerah. Dengan kata lain, keberhasilan fiskal tidak berhenti pada pencapaian indikator ekonomi, tetapi juga menghasilkan modal politik yang memperkuat legitimasi pemerintahan (Martin-Mayoral & Plúa, 2026).

Dari perspektif New Public Governance, pola tersebut menunjukkan adanya transformasi hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat (Dahir et al., 2026). Pengendalian inflasi tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif pemerintah pusat, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai aktor melalui koordinasi kelembagaan, dukungan fiskal, serta partisipasi Masyarakat (Faizin & Zada, 2026). Pemerintah daerah menjadi simpul utama yang menghubungkan berbagai kepentingan tersebut, sehingga keberhasilan pengendalian inflasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun kolaborasi lintas sektor (D. H. Nguyen et al., 2026). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari besar kecilnya anggaran, tetapi juga dari kemampuan menciptakan koordinasi yang menghasilkan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik secara simultan.

Respons fiskal memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar mekanisme pengendalian harga. Instrumen fiskal merupakan representasi kapasitas negara dalam menghadapi krisis ekonomi, membangun kepercayaan publik, serta mempertahankan legitimasi pemerintahan daerah (Ayana & Sore, 2026). Dengan demikian, hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas pemerintahan bersifat multidimensional karena melibatkan interaksi antara kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, persepsi masyarakat, serta komunikasi kebijakan (Shen et al., 2026). Perspektif ini memperluas kajian ekonomi politik lokal dengan menempatkan pengendalian inflasi sebagai bagian dari strategi pemerintahan dalam menjaga stabilitas politik melalui tata kelola fiskal yang adaptif.

Respons Kelembagaan sebagai Manifestasi *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Inflasi Daerah

Apabila respons fiskal merepresentasikan kapasitas pemerintah dalam menyediakan sumber daya, maka respons kelembagaan mencerminkan kemampuan pemerintah mengorganisasi sumber daya tersebut ke dalam mekanisme koordinasi yang efektif (T. Nguyen, 2026). Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, keberadaan kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai arena kolaborasi berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda terhadap stabilitas harga (Farikhin et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas pengendalian inflasi lebih tepat dipahami sebagai hasil dari kualitas hubungan antarlembaga dibandingkan sebagai konsekuensi dari kapasitas satu institusi tertentu (Nofiardi, 2018).

Perspektif tersebut sejalan dengan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yang menekankan bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks memerlukan proses kolaborasi lintas organisasi melalui dialog, kepercayaan, komitmen, dan tujuan bersama (Sakande et al., 2026). Inflasi merupakan salah satu bentuk *wicked problem* karena penyebabnya berasal dari berbagai sektor yang saling berkaitan, mulai dari produksi, distribusi, perdagangan, transportasi, hingga perilaku konsumsi masyarakat. Kompleksitas tersebut menyebabkan tidak ada satu institusi yang memiliki kapasitas penuh untuk mengendalikan inflasi secara mandiri. Dengan demikian, keberhasilan pengendalian inflasi sangat ditentukan oleh kemampuan membangun tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan fungsi berbagai lembaga dalam satu kerangka kebijakan yang koheren (I. Adriansyah et al., 2026).

Dalam konteks Indonesia, penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menunjukkan transformasi pendekatan pemerintah dari model pemerintahan yang bersifat hierarkis menuju pola *network governance* (Sakande et al., 2026). Sebelum penguatan kelembagaan TPID, koordinasi pengendalian inflasi lebih banyak berlangsung melalui hubungan vertikal antara kementerian dan pemerintah daerah. Model tersebut cenderung menghasilkan respons yang lambat karena setiap keputusan harus melalui mekanisme birokrasi yang Panjang (Zaroutieri & Anastasiou, 2026). Sebaliknya, pembentukan TPID menciptakan ruang koordinasi yang memungkinkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya membangun komunikasi yang lebih intensif dalam merespons dinamika harga di wilayah masing-masing. Perubahan ini menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas interaksi antaraktor yang terlibat (Abdulai et al., 2026).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kelembagaan dalam pengendalian inflasi telah berkembang menjadi adaptive institution, yaitu institusi yang mampu menyesuaikan mekanisme kerjanya terhadap perubahan

lingkungan ekonomi (Pilatin et al., 2026). Dalam literatur administrasi publik, institusi yang adaptif dicirikan oleh kemampuan mengolah informasi secara cepat, melakukan koordinasi lintas sektor, serta menghasilkan keputusan yang responsif terhadap perubahan situasi (Zhou et al., 2026). Karakteristik tersebut menjadi sangat penting dalam pengendalian inflasi karena perubahan harga komoditas strategis sering berlangsung dalam waktu singkat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sulit diprediksi, seperti cuaca ekstrem, gangguan distribusi, maupun perubahan permintaan musiman. Oleh sebab itu, kemampuan institusi dalam mengantisipasi perubahan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan menyelesaikan masalah yang telah terjadi (Manasseh et al., 2026).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keberadaan forum koordinasi rutin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memperlihatkan bahwa proses pengendalian inflasi tidak lagi berorientasi pada pengawasan administratif semata, melainkan pada pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*) (Dubey & Sharma, 2026). Setiap forum koordinasi menyediakan ruang bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*), serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan (Fahrullazi & Gheewala, 2026). Mekanisme tersebut mempercepat proses difusi kebijakan karena inovasi yang berhasil diterapkan pada suatu daerah dapat diadaptasi oleh daerah lain tanpa harus melalui proses perumusan kebijakan dari awal. Dengan demikian, koordinasi kelembagaan tidak hanya menghasilkan sinkronisasi kebijakan, tetapi juga mempercepat proses pembelajaran antarwilayah (Akhter & Arman, 2026).

Interpretasi ini memperluas temuan berbagai penelitian internasional mengenai hubungan antara kapasitas kelembagaan dan stabilitas pemerintahan. Rizwanullah et al. (2026), misalnya, menunjukkan bahwa resiliensi sektor publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kemampuan institusi membangun koordinasi lintas organisasi dalam menghadapi krisis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh kualitas hubungan antaraktor, bukan hanya oleh desain organisasi formal. Dalam konteks pengendalian inflasi di Indonesia, argumentasi tersebut menjelaskan mengapa daerah dengan sumber daya yang relatif terbatas tetap dapat menjaga stabilitas harga apabila memiliki mekanisme koordinasi yang efektif (Zhu & Yang, 2026).

Perspektif Institutional Capacity menjelaskan bahwa efektivitas kelembagaan terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas relasional (Neog et al., 2026). Kapasitas analitis berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi penyebab inflasi melalui pemanfaatan data dan informasi yang akurat. Kapasitas operasional berkaitan dengan kemampuan mengimplementasikan kebijakan secara cepat, sedangkan kapasitas relasional mencerminkan kemampuan membangun kerja sama lintas sektor maupun lintas daerah (Igwenyere, 2026). Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi sehingga kelemahan pada salah satu aspek dapat mengurangi efektivitas keseluruhan sistem pengendalian inflasi. Dengan demikian, keberhasilan kelembagaan tidak dapat diukur hanya dari keberadaan organisasi formal, tetapi juga dari kemampuan organisasi tersebut mengelola hubungan dan informasi secara efektif (Matimbia et al., 2026).

Diskusi ini juga dapat dijelaskan melalui konsep *whole-of-government approach*, yaitu pendekatan yang menekankan integrasi kebijakan lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks. Inflasi daerah merupakan persoalan yang melibatkan sektor pertanian, perdagangan, transportasi, keuangan, dan administrasi pemerintahan secara bersamaan. Oleh karena itu, fragmentasi birokrasi justru akan memperlambat proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, koordinasi lintas sektor memungkinkan pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan berbagai dimensi penyebab inflasi secara simultan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi merupakan contoh nyata implementasi *whole-of-government* dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian Chowdhury et al. (2026) mengenai ketahanan pangan di Afrika menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antarlembaga yang mengelola distribusi dan akses pangan. Temuan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konteks Indonesia karena fluktuasi inflasi pangan sering kali dipicu oleh hambatan distribusi dibandingkan kekurangan produksi (Ayalew et al., 2026). Dengan demikian, koordinasi kelembagaan menjadi faktor strategis dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah surplus dan wilayah defisit melalui mekanisme kerja sama antardaerah. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kelembagaan memiliki fungsi sebagai penghubung (*bridging institution*) yang menjembatani kepentingan berbagai wilayah untuk menjaga stabilitas nasional (Iftikhar et al., 2026).

Kajian Oh and Kim (2026) mengenai stabilitas politik di Vietnam juga memberikan perspektif yang menarik bahwa efektivitas institusi formal sering kali diperkuat oleh jejaring informal yang berkembang di dalamnya. Dalam konteks Indonesia, hubungan antarpemerintah daerah yang dibangun melalui forum koordinasi nasional maupun kerja sama antardaerah mencerminkan keberadaan modal sosial kelembagaan yang memperkuat efektivitas organisasi formal (Aloui et al., 2026). Hubungan yang dibangun secara berkelanjutan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, koordinasi distribusi komoditas, dan penyelesaian persoalan secara lebih fleksibel dibandingkan mekanisme birokrasi formal semata. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kualitas jejaring sosial yang berkembang di antara para aktor pemerintahan (Derouez et al., 2026).

Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Sebagaimana disinggung pada bagian metode, keterbatasan utama penelitian ini adalah ketiadaan data primer berupa wawancara langsung dengan kepala daerah, pejabat TPID, maupun warga terdampak inflasi, sehingga interpretasi mengenai dampak respons terhadap stabilitas pemerintahan daerah bersifat inferensial berdasarkan jejak dokumen. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan desain wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap kepala daerah dan anggota TPID di beberapa daerah dengan karakteristik inflasi berbeda, untuk menggali persepsi langsung mengenai tekanan politik yang dirasakan serta strategi komunikasi yang digunakan dalam merespons inflasi. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan dengan menganalisis data sentimen publik di media sosial sebagai indikator persepsi masyarakat terhadap kinerja pengendalian inflasi daerah, guna memperkuat argumen mengenai keterkaitan antara komunikasi politik dan legitimasi pemerintahan daerah.

4. Kesimpulan

Respons politik lokal terhadap inflasi di Indonesia tersusun atas empat kategori tematik yang saling berkelindan, yaitu respons fiskal, kelembagaan, komunikatif-politik, dan sosial. Respons yang dijalankan secara cepat, terkoordinasi lintas tingkat pemerintahan, dan dikomunikasikan secara konsisten oleh kepala daerah cenderung memperkuat legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan daerah, sedangkan keterlambatan respons dan minimnya komunikasi publik berisiko memicu tekanan politik dan ketidakstabilan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah di Indonesia merupakan arena yang secara bersamaan bersifat teknokratik dan politis, sehingga kajian mengenai stabilitas pemerintahan daerah perlu memperhitungkan dimensi komunikasi politik sebagai variabel yang setara pentingnya dengan instrumen fiskal dan kelembagaan. Implikasi praktisnya, penguatan kapasitas komunikasi publik kepala daerah dan TPID lokal perlu menjadi bagian integral dari strategi pengendalian inflasi daerah, sejalan dengan strategi 4K yang telah diadopsi secara nasional.

Reference

- Abdulai, A., Hussain, N. R., & Queku, Y. N. (2026). Capacity Of Innovation And Entrepreneurship Development In Africa: Does Institutional Quality Matter? *Journal Of Innovation And Entrepreneurship*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/S13731-025-00603-8>
- Akhter, T., & Arman, M. A. A. B. M. (2026). Nexus Of Geo-Political Risk, Policy Uncertainties And Renewable Energy Production: The Moderating Roles Of Governance Components. *Energy Reports*, 16. <https://doi.org/10.1016/J.Egyr.2026.109417>
- Aloui, Z., Hamdaoui, M., Sahraoui, W., & Maktouf, S. (2026). Political Stability And The Health Effects Of Climate Change In MENA Countries. *Discover Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12982-026-02144-1>
- Awdeh, A., & El Mokdad, G. (2026). Financial Development And Income Inequality In Developing Countries: The Role Of Institutions And Regional Variation. *Social Sciences And Humanities Open*, 14. <https://doi.org/10.1016/J.Ssaho.2026.103146>
- Ayalew, M. M., Dessie, Z. G., Mitku, A. A., & Zewotir, T. (2026). Machine Learning-Based Approaches To Identify Key Drivers And Predict Severe Food Insecurity In Africa. *Scientific Reports*, 16(1). <https://doi.org/10.1038/S41598-026-47139-9>
- Ayana, I. D., & Sore, A. G. (2026). Africa's Tourism Development, Political Stability, And Economic Growth Using The GMM Econometric Appraisal Technique. *Discover Sustainability*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/S43621-026-02833-6>
- Chowdhury, E. K., Pellegrino, A., & Dhar, S. S. (2026). Institutional Drivers Of Public Sector Resilience: Governance Capacity, Fiscal Investment, And Demographic Pressure In South Asia. *Social Sciences And Humanities Open*, 14. <https://doi.org/10.1016/J.Ssaho.2026.103192>
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (1st Ed., Vol. 1).
- Dahir, H. G., Ibrahim, A. J., & Muse, A. H. (2026). Modelling The Impact Of Economic Development, Health-Related Factors And Political Instability On Life Expectancy In Somalia: An ARDL Approach. *Discover Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12982-026-01537-6>
- Derouez, F., Ifa, A., Alrawad, M., & Zayed, M. (2026). The Effects Of Climate Change Water Dependency And Policy Solutions On Food Security In Egypt. *Scientific Reports*, 16(1). <https://doi.org/10.1038/S41598-026-38489-5>
- Dubey, A., & Sharma, H. (2026). Does Firms' Perceived Political Instability Affect Energy Poverty? *Energy Policy*, 217. <https://doi.org/10.1016/J.Enpol.2026.115434>
- Fahrullazi, F., & Gheewala, S. H. (2026). Life Cycle Criticality Assessment Of Lithium-Ion Battery In Southeast Asia: Evaluating Source Diversification And Circularity Strategies. *Journal Of Power Sources*, 689. <https://doi.org/10.1016/J.jpowsour.2026.240703>
- Faizin, A., & Zada, K. (2026). Nationalizing Sharia: Challenging The Hegemony Of Ahad Hadith And The Politics Of Legal Codification In Saudi Arabia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 388–410. <https://doi.org/10.29240/Jhi.V11i1.15972>
- Fariqhin, A., Ridwan, H. A., & Mulyasari, H. (2024). Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Asy-Syariah>
- Fernandez-Ardavin, A., Gil-Alana, L. A., Goded, M., & Solarin, S. A. (2026). Persistence And Trends In Governance Indicators In Sub-Saharan Africa. *Discover Global Society*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/S44282-026-00403-9>
- I. Adriansyah, M., A., H. S., Margono, H., Hardiansyah, J., Firnando, J., & Sennang. (2026). Proactive Personality, Psychological Capital, And Work Readiness Among Prospective Teacher Students: A PLS-SEM Mediation Study. *The International Journal Of Body, Mind And Culture (IJBMC)*, 13(6), 1–10.
- Iftikhar, H., Guang, L., Ullah, A., & Qian, N. (2026). Green Development Through Disruptive Financial Technology And Modern Belt And Road Spillover: A Pathway To The Net-Zero Future In Asia, Europe, And Africa. *Financial Innovation*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/S40854-026-00931-Y>
- Igwenyere, F. O. (2026). Will Social Justice For The People Of Southeast Nigeria Prevent Biafra's Secession? *Humanities And Social Sciences Communications*, 13(1). <https://doi.org/10.1057/S41599-025-06423-1>
- Iqbal, M., Hakim, L., & Aziz, M. A. (2026). Determinants Of Islamic Bank Stability In Asia. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 17(1), 162–178. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0174>
- Liashenko, O., Dluhopolskyi, O., Wołowicz, T., & Woźniak, D. (2026). Governance Quality And Renewable Energy Transition: Global Evidence Using Panel ARDL. *Energies*, 19(4). <https://doi.org/10.3390/En19041024>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11959>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Manasseh, C. O., Logan, C. S., Okanya, O. C., Ejime, O. M., Ede, K. K., Onuselogu, O. C. O., Igwemeka, E. C., Nkwonta, N. C., & Akamobi, O. G. (2026). Financial Inclusion, Green Bonds, And Energy Efficiency Impact Economic Growth In Asia Under Institutional Quality Environment And Global Economic Uncertainty. *Discover Sustainability*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/S43621-026-02998-0>
- Martin-Mayoral, F., & Plúa, M. G. P. (2026). Governance And Inequality In Latin America: Is There Evidence Of An Institutional Kuznets Curve? *Economics Of Governance*, 27(1). <https://doi.org/10.1007/S10101-025-00344-0>
- Matimbia, L. M., Deka, A., Ozdeser, H., & Deka, S. (2026). The Corrosive Grip: How Corruption Inhibits Green Finance In Enhancing Environmental Sustainability. *Risks*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/Risks14020031>
- Musse, O. S. H., Echchabi, A., Mohamed, M. A., & Farah, A. A. (2026). Foreign Direct Investment And Political Stability As Determinants Of Renewable Energy Consumption In The East African Community. *Discover Sustainability*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/S43621-025-02435-8>
- Neog, Y., Singh, B. P., & Yadav, V. (2026). Navigating Terrorism And Policy Stringency: A Path To Sustainable Development Through Green Innovations In BRICS. *Humanities And Social Sciences Communications*, 13(1). <https://doi.org/10.1057/S41599-026-07090-6>
- Nguyen, D. H., Tran, L., Vien, N. T., Hashan, M. R., Tripathi, A., Han, S. M., Nguyen, A. H., Trinh, N. B., Shabbo, E. E., Thang, D. X., Le An, P., Vaghela, G., & Huy, N. T. (2026). Impact Of Socio-Economic And Political Factors On Global COVID-19 Vaccine Coverage: An Empirical Study. *Tropical Medicine And Health*, 54(1). <https://doi.org/10.1186/S41182-025-00877-4>
- Nguyen, T. (2026). Hometown Networks And The Limits Of Institutional Power In Vietnam's Elite Circles. *Journal Of Vietnamese Studies*, 21(1), 90–118. <https://doi.org/10.1525/Vs.2026.21.1.90>
- Nofiard. (2018). Perkawinan Dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1), 49–72. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/Alihkam/>
- Oh, C. B., & Kim, Y. (2026). Determinants Of Nationally Determined Contributions (Ndc) Updates Under The Paris Agreement. *Discover Environment*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/S44274-026-00667-7>
- Pilatin, A., Soto, G. H., & Barut, A. (2026). Towards A Less Polluted: The Impact Of Governance Indicators And Renewable Energy Investments And Technology On Carbon Emissions In European Countries. *Geological Journal*, 61(2), 466–488. <https://doi.org/10.1002/Gj.5243>
- Rizwanullah, M., Shiyu, L., Nasrullah, M., & Alnafissa, M. (2026). Do Climate Policy Stringency And Economic Factors Improve Environmental Performance In BRICS Countries: The Moderating Role Of Political Stability. *Environmental Sciences Europe*, 38(1). <https://doi.org/10.1186/S12302-025-01305-4>
- Ryter, J., & Nassar, N. (2026). Estimating The Probability Of Export Restrictions To Inform Mineral Criticality. *Resources, Conservation And Recycling*, 226. <https://doi.org/10.1016/J.Resconrec.2025.108629>
- Sakande, M., Ouedraogo, I., & Sawadogo, R. (2026). Effects Of Economic Freedom On Youth Unemployment In Sub-Saharan Africa. *Research In Economics*, 80(3). <https://doi.org/10.1016/J.Rie.2026.101131>
- Shen, W., Zhai, X., Wan, L., & Ren, X. (2026). Unlocking Internationalization Success In Construction: A Configurational Analysis Of Firm Strategies And Market Dynamics. *Journal Of Construction Engineering And Management*, 152(2). <https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-16589>
- Songsrirote, N. (2026). Divergent Drivers Of Crime In Asia: A Comparative Panel Analysis Of Institutional And Socioeconomic Factors. *Humanities And Social Sciences Communications*, 13(1). <https://doi.org/10.1057/S41599-026-06718-X>
- Talandier, M., & Hachaichi, M. (2026). Mapping Material Dependencies And Supply Chain Exposure: A Regional Resilience Assessment In France. *Resources, Conservation And Recycling*, 226. <https://doi.org/10.1016/J.Resconrec.2025.108691>
- Zaroutieri, E., & Anastasiou, A. (2026). Growth, Fiscal Stance, And Governance: Unveiling Energy Poverty Volatility In The European Union. *Journal Of Risk And Financial Management*, 19(2). <https://doi.org/10.3390/Jrfm19020129>
- Zhou, Y. B., Huang, Z., Zhang, C. J., & Xia, M. (2026). Health Is The New Safety: Destination Public Health Vulnerability, Resilience, And International Tourism. *Journal Of Destination Marketing And Management*, 41. <https://doi.org/10.1016/J.Jdmm.2026.101121>
- Zhu, X., & Yang, H. (2026). Impact Of Gender Equality On Forest Protection: Role Of Economic, Social, Political And Energy Factors. *Land Use Policy*, 169. <https://doi.org/10.1016/J.Landusepol.2026.108148>